



AKSI P
KABUPATEN HUKUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 38 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN KEENAM PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (4) bahwa pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 106 ayat (3) bahwa Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
 - c. bahwa untuk maksud huruf a, dan huruf b diatas, maka belanja pegawai gaji dan tunjangan PNSD termasuk dalam kelompok belanja yang bersifat mengikat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan huruf c diatas maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- A R S I P
KABUPATEN TAPANULIRANG
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
 28. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8);
 30. Peraturan Bupati Pangkajene dan kepulauan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 105);

MEMUTUSKAN

A R S I P
BAGIAN HUKUM

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Daerah Dtonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pelaksanaan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
11. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
13. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

14.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat **SILPA** adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang berubah terdiri dari;

NOMOR	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	PENDAPATAN	1.235.830.688,235.00	1.235.830.688,235.00	0.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125.262.453,000.00	125.262,453,000.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	68,585,110,395.00	68,585,110,395.00	0.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	37,719,735,105.00	37,719,735,105.00	0.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,900,000,000.00	9,900,000,000.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,157,607,500.00	9,157,607,500.00	0.00
1.2	DANA PERIMBANGKAN	872,838,033,455.00	872,838,033,455.00	0.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33,655,619,455.00	33,655,619,455.00	0.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	650,132,194,000.00	650,132,194,000.00	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	189,050,220,000.00	189,050,220,000.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	237,630,201,780.00	237,630,201,780.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,402,060,000.00	1,402,060,000.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36,465,065,260.00	36,465,065,260.00	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	163,396,871,000.00	163,396,871,000.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36,366,205,520.00	36,366,205,520.00	0.00
2	BELANJA	1,263,578,396,332.00	1,328,584,552,678.55	65,006,156,346.55
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	565,428,188,557.16	630,434,344,903.71	65,006,156,346.55
2.1.1	Belanja Pegawai	505,790,799,472.16	570,796,955,818.71	65,006,156,346.55
2.1.2	Belanja Bunga	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	19,260,000,000.00	19,260,000,000.00	0.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,315,100,000.00	2,315,100,000.00	0.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	345,312,500.00	345,312,500.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	36,686,976,585.00	36,686,976,585.00	0.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	698,150,207,774.84	698,150,207,774.84	0.00
2.2.1	Belanja Pegawai	53,504,804,625.00	53,504,804,625.00	0.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199,877,946,761.75	199,877,946,761.75	0.00
2.2.3	Belanja Modal	444,767,456,388.09	444,767,456,388.09	0.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27,747,708,097.00)	(32,753,864,443.55)	65,006,156,346.55
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	29,447,708,097.00	58,549,489,725.68	29,101,781,628.68
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29,447,708,097.00	58,549,489,725.68	29,101,781,628.68
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	0.00
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	27,747,708,097.00	56,849,489,725.68	29,101,781,628.68
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMBAHA	0.00	(35,904,374,717.87)	(35,904,374,717.87)

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 28 September 2015

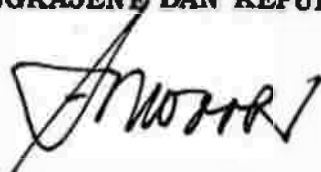
Pj. BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



RUSLAN ABU

Diundangkan di Pangkajene
Pada Tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**



ANWAR RECCA

**BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015
NOMOR 29**

Lampiran : Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
 Nomor : Tahun 2015
 Tentang : Perubahan Keenam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
 Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran
 Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

ARSI
 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH (TAMBAH/KURANG)
1	PENDAPATAN	1,235,830,688,235.00	1,235,830,688,235.00	0.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125,362,453,000.00	125,362,453,000.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	68,585,110,395.00	68,585,110,395.00	0.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	37,719,735,105.00	37,719,735,105.00	0.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,900,000,000.00	9,900,000,000.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,157,607,500.00	9,157,607,500.00	0.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	872,838,033,455.00	872,838,033,455.00	0.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33,655,619,455.00	33,655,619,455.00	0.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	650,132,194,000.00	650,132,194,000.00	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	189,050,220,000.00	189,050,220,000.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	237,630,201,780.00	237,630,201,780.00	0.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,402,060,000.00	1,402,060,000.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36,465,065,260.00	36,465,065,260.00	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	163,396,871,000.00	163,396,871,000.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36,366,205,520.00	36,366,205,520.00	0.00
2	BELANJA	1,263,578,396,332.00	1,328,584,552,678.55	65,006,156,346.55
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	565,428,188,557.16	630,434,344,903.71	65,006,156,346.55
2.1.1	Belanja Pegawai	505,790,799,472.16	570,796,955,818.71	65,006,156,346.55
2.1.2	Belanja Bunga	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	19,260,000,000.00	19,260,000,000.00	0.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,315,100,000.00	2,315,100,000.00	0.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	345,312,500.00	345,312,500.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	36,686,976,585.00	36,686,976,585.00	0.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH (TAMBAH/KURANG)
2.2	BELANJA LANGSUNG	698,150,207,774.84	698,150,207,774.84	0.00
2.2.1	Belanja Pegawai	53,504,804,625.00	53,504,804,625.00	0.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199,877,946,761.75	199,877,946,761.75	0.00
2.2.3	Belanja Modal	444,767,456,388.09	444,767,456,388.09	0.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27,747,708,097.00)	(92,753,864,443.55)	(65,006,156,346.55)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	29,447,708,097.00	58,549,489,725.68	29,101,781,628.68
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29,447,708,097.00	58,549,489,725.68	29,101,781,628.68
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	27,747,708,097.00	56,849,489,725.68	29,101,781,628.68
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	(35,904,374,717.87)	(35,904,374,717.87)

Pj. BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ARSIP
BAGIAN HUKUM

RUSLAN ABU